

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan.2009. *Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Efendi, S, dkk. (2024). *Buku Referensi Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber*. PT Media Penerbit Indonesia
- Jimmy Asshiddiqie. 2010. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. 2006. *Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Kusnu Goesniadhie S, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, Surabaya: JPBooks.
- Mahfud MD. 2023. *Analisis Putusan MKMK/L/11/2023*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Rahardjo, S. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Santoso, J.T. 2023. *Etika Sebagai Landasan Perilaku Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wildan Sayuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

C. Jurnal

Auliadi, M. I. A. dkk. 2024. "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023". *Sosio Yustisia*, 7(2).

Adelia, A. 2022. 'Relevansi Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Oleh Komisi Yudisial', *Jurnal Majelis*, 3(2).

Adam Ilyas, dkk. 2022. Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya. *Jurnal Konstitusi*, Vol.19, No.4.

Arifa, S.A. 2024. *Pendekatan Prof. Jimly Asshiddiqie terhadap kode etik profesi hakim: Studi kasus pemberhentian Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi*. ResearchGate.

Achmad Edi Subiyanto. 2011. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4.

- Ahmad Rizal, dkk. 2024. "Efisiensi Pengawasan Internal Terhadap Mahkamah Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," *Tanjungpura Legal Review* 2, No. 2,
- Ahmad Fadlil Sumadi. 2011. Independensi Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5.
- Alaya Rihadatul Aisya, dkk. 2024. "Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Undang Undang Dasar Dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Ketua Mahkamah Konstitusi," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3.
- Alfianda, dkk. (2024). Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi. Wathan: *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 64–75.
- Alfret. 2024. PELANGGARAN KODE ETIK OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA NEPOTISME! Vol. 10 No. 2: *Veritas et Justitia*.
- Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 17
- Bambang Sutyoso. 2010. 'Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 7(6).
- Bintang, D. dan Roido, M. 2023. 'PELANGGARAN KODE ETIK: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi', *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(2).
- Deta, Melkianus Umbu, dkk. 2024. "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)." *Student Research Journal* Vol. 2, no. 4.

- Engelbertus Tobu, dkk. 2024. "Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi," *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis 2, No. 1*.
- Firmantoro, Z.A. 2020 'Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020', *Jurnal Konstitusi*, 17(4).
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177–188. hlm 15
- Fathan Fadhlullah, 2024, Politik Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tentang Etika Hakim Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam Vol. 14 No. 1*.
- Fikra, Mulazi Ibna. 2023. "Conflict of interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah 2.2: 179-190*
- Fridawati, T, dkk 2024. Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 78–88.
- Gani, H.P. dan Abdullah, A.G. 2020. 'Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana', *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1).
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2),
- Hidayat, A., dkk. 2024. 'Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator', *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3).

- Irawan, A.D. dan Ichsan, M. 2024. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*
- Indriyanto Seno Adji, 2007. Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tipikor, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 4
- Kautsar, K.A. 2024. *Integritas hakim konstitusi dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden: Studi analisis putusan MKMK*. UIN Jakarta Repository.
- Mawangi, R. 2023. Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PPU-XXI/2023 Terhadap Kode Etik Hakim Ditinjau dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 13(2)
- Mawaddah, F., dkk. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. At-Tasyri': *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2),
- Mene, M. 2023. 'Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023', *Jurnal Ensiklopedia Education Review*, 5(3)
- Mizan, N., dkk. 2024. 'Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik', *Jurnal Ilmiah Kutei*
- Oheo K. Haris, 2017. "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus," *Jurnal Ius Constituendum Vol. 2, No. 2*,
- Rayhan Azryal Syahputra. 2023. Etika Profesi Hakim MK Terhadap Kode Etik Hakim MK Dalam Putusan MK No. 90/PUUXXI/2023, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2.

- Rio Subandri. 2023 'Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden', *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1)
- Richard D. Aldrich, Judicial Independence in a Democratic Society, *The Advocate, The Law Review of the International Academy of Trial Lawyers*, Vol. 1, No. 1, 1995,
- Rusydi, M. 2021 'Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Subiyanto, A.E. 2012 'Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman', *Jurnal Konstitusi*, 9(4).
- Tauda, Gunawan A. 2024. "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi" 31: 358–83
- Tanto Lailam. 2020. Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol 20, No 4.
- Tambunan,dkk. 2023. "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023)."
- Walujan, V.A., dkk. 2023. 'Implikasi Konstitusional Penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia', *Lex Administratum*, 12(1).
- Wantu, F. M. 2007. Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 19(3).
- Wahyu Aji Ramadan, dkk. 2022. Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*. Vol. 3 No. 02

D. Internet

The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002,

http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/langgar-5-prinsip-kode-etik--anwar-usman-dicopot-dari-jabatan-ketua-mk-lt654a47cfc992c/?page=1>,

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/08/05100001/pro-kontra-putusan-mk-mk-terhadap-anwar-usman?page=all#google_vignette,

Merdeka.com,2023, Mahfud: Putusan MK Inkrah dan harus diikuti walau adapelanggarnetikahakim,dikutipdari:url:<https://www.merdeka.com/politik/mahfud-putusan-mk-inkrah-dan-harusdiikuti-walau-ada-pelang-garan-etik-hakim-43067-mvk.html?screen=1>, Eramuslim, “Pelanggaran Berat Bisa Buat Putusan Tidak Sah, Bivitri: Perlu Dikoreksi”, Pelanggaran Berat Bisa Buat Sebuah Putusan Tidak Sah, Bivitri: Perlu Dikoreksi – Eramuslim, diakses pada 26 Mei Pukul 03.12 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/08/05150071/sanksi-mk-mk-dianggap-kurang-tegas-anwar-usman-dinilai-mestinya-dipecat-dari?page=all>,

<https://www.tempo.co/politik/hakim-mk-arief-hidayat-sebut-nepotisme-dan-abuse-of-power-ini-artinya-65531>,

<https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-soal-hakim-mk-anwar-usman-paman-gibran-yang-dilaporkan-ke-kpk-dugaan-nepotisme--129171>, diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 13.00 WIB